

Laporan TPB Jakarta: Pelopor Pembangunan Berkelanjutan atau Sekadar Formalitas? Studi Evaluasi Peraturan Nasional

Widy Kasmawala¹, Dyah Setyaningrum²

Universitas Indonesia, Indonesia

widycho@gmail.com

Submitted: 08th Jan 2025 | **Edited:** 28th March 2025 | **Issued:** 01st June 2025

Cited on: Kasmawala, W., & Setyaningrum, D. (2025). Laporan TPB Jakarta: Pelopor Pembangunan Berkelanjutan atau Sekadar Formalitas? Studi Evaluasi Peraturan Nasional. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 12(1), 1-6.

Abstract

The 2030 Agenda for Sustainable Development aims to create an inclusive, fair, and sustainable world amid global challenges such as the pandemic, climate change, and geopolitical tensions. In this context, the TPB/SDGs report serves as a crucial tool for monitoring progress, ensuring transparency, and supporting effective decision-making. This study aims to evaluate the compliance of DKI Jakarta's TPB/SDGs Achievement Report with applicable regulations. The evaluation focuses on reporting criteria based on Ministerial Decree No. 136/M.PPN/HK/12/2021, information coverage in line with Ministerial Decree No. 42/M.PPN/HK/04/2020, and the integration and interrelation of the report referring to Ministerial Decree No. 7/2018. A qualitative approach was employed, using a case study, interviews with the Jakarta SDGs Secretariat Coordination Team, and document reviews. The analysis was conducted through triangulation and key informant confirmation. The results indicate that the report complies with most provisions, meeting reporting criteria and adequately covering information in accordance with the guidelines. The report reflects cross-sectoral integration, although some aspects require further development. Key challenges include inter-agency coordination, data limitations, and insufficient platform integration. The Jakarta Provincial Government addresses these issues by enhancing coordination, engaging stakeholders, and developing an integrated data platform. The TPB/SDGs report of DKI Jakarta plays a vital role in reflecting sustainable development efforts, with adjusted indicators tailored to regional characteristics. This initiative is expected to serve as a model for other regions in achieving sustainable development goals.

Keywords: DKI Jakarta; TPB/SDGs Achievement Report; Sustainable Development; Reporting Evaluation

Abstrak

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 bertujuan menciptakan dunia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik. Dalam konteks ini, laporan TPB/SDGs menjadi alat penting untuk memantau kemajuan, memastikan transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dilakukan terhadap kriteria pelaporan berdasarkan Kepmen PPN No. 136/M.PPN/HK/12/2021, cakupan informasi sesuai Kepmen PPN No. 42/M.PPN/HK/04/2020, serta integrasi dan keterkaitan laporan yang merujuk Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2018. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus, wawancara dengan Tim Koordinasi Sekretariat SDGs DKI Jakarta, dan telaah dokumen. Analisis dilakukan melalui triangulasi dan konfirmasi informan. Hasil menunjukkan bahwa laporan telah memenuhi sebagian besar ketentuan, dengan kriteria pelaporan yang sesuai dan cakupan informasi yang cukup merujuk pedoman. Laporan mencerminkan integrasi lintas sektor, meskipun beberapa informasi masih perlu pengembangan. Tantangan utama meliputi koordinasi antarinstansi, keterbatasan data, dan kurangnya integrasi platform. Pemerintah DKI Jakarta mengatasi ini melalui peningkatan koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pengembangan platform data terpadu. Laporan TPB/SDGs DKI Jakarta berperan penting dalam mencerminkan upaya pembangunan berkelanjutan, dengan penyesuaian indikator sesuai karakteristik daerah.

Kata Kunci: DKI Jakarta; Laporan Pencapaian TPB/SDGs; Pembangunan Berkelanjutan; Evaluasi Pelaporan

PENDAHULUAN

Tantangan abad ke-21 memerlukan evaluasi ulang terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Sejak 2015, TPB/SDGs bertujuan menciptakan dunia yang berkelanjutan, namun konflik, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19 menghambat pencapaiannya, terutama di negara berkembang (Bebbington & Unerman, 2018; Erin & Bamigboye, 2022). Di Indonesia, pelaksanaan TPB/SDGs diselaraskan dengan perencanaan pembangunan nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sasaran TPB/SDGs diperbarui dalam RPJMN dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, namun pelaksanaan di daerah masih menghadapi tantangan politik, hukum, dan keterlibatan semua pihak (Kementerian PPN/Bappenas, 2019, 2021; Presiden Republik Indonesia, 2022).

Pelaporan TPB/SDGs penting untuk memantau progres, transparansi, dan perencanaan kebijakan. Laporan ini mengidentifikasi kemajuan dan kelemahan implementasi serta memastikan akuntabilitas. Namun, di Indonesia, pelaporan masih bersifat sukarela, sehingga konsistensi dan akuntabilitas data menjadi kendala (Abhayawansa et al., 2021; Sari et al., 2022). Evaluasi laporan pencapaian TPB/SDGs di DKI Jakarta memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan Jakarta terhadap peraturan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaporan TPB/SDGs, mengacu pada Kepmen PPN No. 136/M.PPN/HK/12/2021 sebagai pedoman umum dalam pelaporan RAD TPB/SDGs di seluruh Indonesia untuk kriteria pelaporan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan berdasarkan Kepmen PPN No. 42/M.PPN/HK/04/2020 yang mengatur Peta Jalan TPB/SDGs untuk cakupan informasi dan detail pengungkapan, serta Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2018 yang menjadi

pedoman teknis dalam penyusunan RAN TPB/SDGs, khususnya untuk aspek integrasi dan keterkaitan antar sektor.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Masuda et al., (2022), Forestier & Kim, (2020), Abhayawansa et al., (2021), Pineda-Escobar (2019b), dan Permatasari et al., (2021), mengkaji bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan untuk TPB/SDGs, serta peran mereka dalam mencapai tujuan keberlanjutan melalui empat kategori utama: harapan dan visi, membangun jaringan serta mengelola sumber daya, pengetahuan dan pembelajaran, serta mendukung implementasi kebijakan (Giles-Corti et al., 2020; Meuleman, 2021). Selain itu, Masuda et al. (2021) membandingkan pencapaian TPB/SDGs di tingkat lokal di Jepang, memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah dapat mengevaluasi kemajuan menuju tujuan TPB/SDGs 2030, seperti yang terlihat pada Kota Shimokawa dan Kota Kitakyushu. Raffer et al., (2022) menyoroti peran Pemerintah Jerman dalam inovasi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci transisi perkotaan yang berkelanjutan. Penelitian oleh Rahman (2021) dan Meuleman (2021) mengkaji tantangan kelembagaan dalam implementasi TPB/SDGs, sementara Akbar et al. (2020) mengevaluasi praktik partisipasi masyarakat dalam penilaian berbasis TPB/SDGs. Odagiri et al. (2020) dari UNICEF Indonesia meneliti dukungan pemerintah dalam pencapaian TPB/SDGs untuk air dan sanitasi di Indonesia Timur, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam keberhasilan program.

Tantangan utama yang dihadapi Jakarta sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, bukan bencana alam. Pertama, perkembangan kota yang berorientasi pada kendaraan pribadi telah menciptakan "urban sprawl," yang mengakibatkan perluasan lahan perkotaan yang tidak terkendali. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara, dan akses terbatas terhadap transportasi umum yang efektif. Selain itu, Jakarta masih mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan dasar yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan yang layak, sehingga banyak penduduk tinggal di lingkungan kumuh dengan akses terbatas terhadap fasilitas tersebut. Terakhir, praktik pembangunan yang tidak ramah lingkungan, seperti pembuangan sampah sembarangan dan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem serta berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Tantangan-tantangan ini menghambat Jakarta dalam mencapai status sebagai kota global yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Evaluasi Laporan Pencapaian TPB/SDGs di DKI Jakarta memiliki peran penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan Jakarta terhadap peraturan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaporan TPB/SDGs, dengan mengacu pada Kepmen PPN No. 136/M.PPN/HK/12/2021 sebagai pedoman umum pelaporan RAD TPB/SDGs di seluruh Indonesia. Selain itu, evaluasi juga dilakukan berdasarkan Kepmen PPN No. 42/M.PPN/HK/04/2020 yang mengatur Peta Jalan TPB/SDGs untuk cakupan informasi dan detail pengungkapan, serta Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2018 sebagai pedoman teknis penyusunan RAN TPB/SDGs, khususnya untuk aspek integrasi dan keterkaitan antar sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Laporan Pencapaian TPB/SDGs

DKI Jakarta tahun 2022, dengan menggunakan wawancara dan telaah dokumen untuk memahami proses penyusunan laporan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan pelaporan sekaligus memperkaya literatur tentang implementasi TPB/SDGs di tingkat regional, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan laporan yang komprehensif, diharapkan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami tantangan pencapaian TPB/SDGs dan mendorong kolaborasi antar pihak terkait. Laporan ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih efektif, serta menjadikan pelaksanaan TPB/SDGs di Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

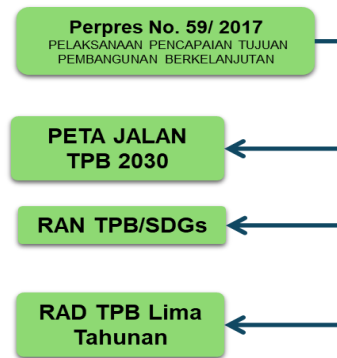
LANDASAN TEORI

Kebijakan Pendorong Keberlanjutan

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pencapaian TPB/SDGs 2030 tercermin melalui berbagai undang-undang dan peraturan strategis. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berfungsi sebagai pilar utama untuk perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 menetapkan strategi, mekanisme, dan koordinasi antar kementerian untuk mencapai TPB/SDGs, mendukung partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pencapaian tujuan ini (Mohieldin et al., 2023).

Berbeda dengan MDGs, TPB/SDGs memperhatikan perspektif pembangunan yang lebih komprehensif, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan ini menekankan solusi menyeluruh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberi peran yang seimbang kepada setiap negara, tanpa memandang tingkat kemajuan ekonomi mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi negara untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya pembangunan global, dengan setiap negara memikul tanggung jawab unik dalam mencapai TPB/SDGs (McSweeney & Hayhurst, 2021; Bexell & Jönsson, 2021).

Untuk mendukung implementasi TPB/SDGs, pemerintah Indonesia telah merancang Peta Jalan TPB 2030 sebagai panduan strategis jangka panjang. Selain itu, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs menyediakan langkah-langkah operasional tingkat nasional, sementara Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Lima Tahunan mendetailkan pelaksanaan di tingkat daerah. Ketiga dokumen ini saling mendukung untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sesuai dengan prinsip keberlanjutan, kolaborasi, dan integrasi (Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2018).



Gambar 1. Penguatan Kerangka Kerja TPB/SDGs di Indonesia

Sumber : Data Penelitian, 2024

Peta Jalan TPB/SDGs 2030 adalah dokumen strategis yang dirancang untuk memandu Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan hingga 2030, yang diatur dalam Kepmen Nomor 42/M.PPN/HK/04/2020. Dokumen ini mengatur langkah-langkah implementasi yang mempertimbangkan tantangan lokal dan global, seperti dampak pandemi COVID-19. Peta jalan ini mencakup analisis keterkaitan antar indikator SDGs, strategi pencapaian untuk 17 tujuan SDGs, serta pendanaan yang berkelanjutan. Pendekatannya berbasis data dan melibatkan analisis top-down dan bottom-up untuk kebijakan berbasis bukti, dengan tujuan memastikan kolaborasi efektif antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs adalah kerangka kerja strategis yang mengatur koordinasi dan implementasi TPB di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2018, rencana ini memastikan pelaksanaan TPB secara terkoordinasi, terintegrasi, dan efektif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Rencana ini juga mengintegrasikan SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, seperti RPJMN dan RPJPN, dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi pelaporan. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan inklusif yang mengatasi tantangan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kerusakan lingkungan, dengan fokus pada keberlanjutan dan inklusivitas.

Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs (RAD TPB/SDGs) berdasarkan Kepmen PPN No. 136/M.PPN/HK/12/2021 memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk menyusun, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan TPB/SDGs secara transparan dan akuntabel. Pedoman ini mengatur tata cara pelaporan yang mencakup analisis capaian, hambatan, dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi TPB di daerah. Pemerintah daerah diharapkan menggunakan indikator yang relevan dengan konteks lokal, tetapi tetap harmonis dengan indikator nasional dan global SDGs. Laporan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah.

Pembangunan Berkelanjutan di DKI Jakarta

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mencapai TPB/SDGs melalui kebijakan, regulasi, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik yang adil. Akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan sangat penting bagi pemerintah karena mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab dalam pencapaian TPB/SDGs. Pelaporan yang jelas dan terukur membantu memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja pemerintah, meningkatkan

kepercayaan publik, serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kebijakan yang dijalankan (Abhayawansa et al., 2021; Sari et al., 2022). Hal ini juga menciptakan ruang untuk perbaikan berkelanjutan dengan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi mereka berdasarkan data yang dikumpulkan (Meuleman, 2021).

Pemerintah, sebagai pelopor pelaporan keberlanjutan, perlu mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif dan inklusif, termasuk pengumpulan data yang andal, pengembangan indikator kinerja, serta penerapan proses yang memastikan integritas informasi (Sari et al., 2022). Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan ekosistem pelaporan yang efektif (Akbar et al., 2020). Pemerintah yang memimpin dalam pelaporan keberlanjutan tidak hanya memenuhi tanggung jawab mereka, tetapi juga menginspirasi sektor lain untuk mengikuti jejak mereka (Raffer et al., 2022).

DKI Jakarta, sebagai pusat kebijakan dan ekonomi, memiliki pengaruh besar dalam pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadopsi 17 tujuan dan 253 indikator TPB/SDGs yang relevan dengan konteks daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2018. Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 tahunan disusun dengan melibatkan berbagai sektor untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan prinsip "no one left behind" dalam pencapaian tujuan (Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017).

DKI Jakarta memiliki peran penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi 17 tujuan dan 253 indikator TPB yang relevan dengan konteks daerah. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2018 mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB, yang menjadi bagian dari komitmen implementasi TPB. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, Gubernur menyusun RAD 5 tahunan bersama Bupati/Walikota dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk ormas, pelaku usaha, dan akademisi. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan DKI Jakarta

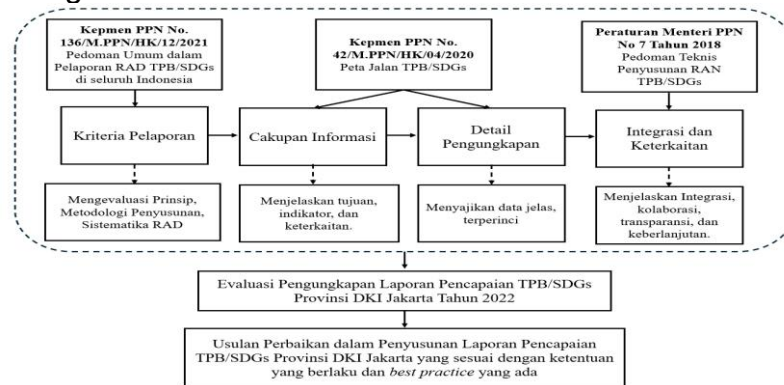
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2018, menjadi pedoman strategis pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kemudian Ahmad Riza Patria). Visi RPJMD adalah "Maju Kotanya, Bahagia Warganya", dengan lima misi utama yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kota yang nyaman, membangun pemerintahan yang bersih, memastikan keberlanjutan pembangunan, dan membentuk ekosistem kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Program prioritas seperti hunian DP 0 Rupiah, peningkatan transportasi publik, penanganan banjir, pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama.

Dalam pelaporan pencapaian TPB/SDGs, DKI Jakarta mengintegrasikan indikator SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pendekatan ini

memastikan program-program yang dilaksanakan mendukung pencapaian target SDGs. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memperkuat sistem data melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan serta evaluasi laporan untuk meningkatkan inklusivitas dan akuntabilitas. Pemprov DKI Jakarta juga memanfaatkan teknologi digital dalam menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs, menggunakan platform digital untuk mengelola data, memantau indikator, dan menyusun laporan sesuai pedoman nasional. Pendekatan ini sejalan dengan konsep City 4.0, di mana pemerintah berperan sebagai kolaborator, mendorong sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk membangun Jakarta secara inklusif dan berkelanjutan. Program dan kebijakan dievaluasi melalui indikator kinerja utama (IKU), yang mendukung pencapaian TPB/SDGs dan memastikan keberlanjutan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimulai dengan analisis konten terhadap laporan pencapaian TPB/SDGs DKI Jakarta untuk memastikan kesesuaian dengan Kepmen No. 136/M.PPN/HK/12/2021. Laporan ini penting untuk mengkomunikasikan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai SDGs hingga 2030. Peneliti akan mengevaluasi sejauh mana informasi mencerminkan pencapaian yang faktual dan relevan, serta memeriksa apakah laporan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Fokus evaluasi meliputi kepatuhan terhadap peraturan laporan yang jelas, terstruktur, dan logis, dengan penilaian pada kelengkapan informasi, transparansi data, keterlibatan pemangku kepentingan, dan keselarasan dengan kebijakan daerah, seperti RPJMD. Hasil analisis akan diikuti dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan laporan di masa mendatang.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Sumber : Data Penelitian, 2024

Selain itu, evaluasi juga akan merujuk pada Kepmen PPN No. 136/M.PPN/HK/12/2021 yang memberikan pedoman umum pelaporan RAD TPB/SDGs di seluruh Indonesia, serta kriteria pelaporan yang tercantum dalam Kepmen PPN No. 42/M.PPN/HK/04/2020. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan Peta Jalan TPB/SDGs yang mengatur cakupan informasi dan detail pengungkapan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PPN No. 7 Tahun 2018, serta Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB/SDGs yang menjelaskan integrasi dan keterkaitan antar indikator dalam pelaporan TPB/SDGs. Hasil analisis akan diikuti dengan kesimpulan dan rekomendasi

untuk pengembangan laporan di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama pengumpulan data.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber yang relevan untuk mendalami pencapaian TPB/SDGs di DKI Jakarta, antara lain laporan tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dokumen kebijakan terkait TPB/SDGs, serta hasil evaluasi dan studi terdahulu yang memberikan wawasan mengenai implementasi dan tantangan dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut di wilayah ini. Prosedur telaah dokumen pelaporan pencapaian TPB/SDGs di DKI Jakarta dilakukan dengan memberikan checklist pada setiap komponen dalam tabel, yang menilai kesesuaian dengan ketentuan Kepmen No. 136/M.PPN/HK/2021. Kriteria checklist mencakup ketersediaan komponen, kebutuhan klarifikasi, ketidaksesuaian, dan relevansi untuk konteks evaluasi saat ini. Pertanyaan wawancara untuk mengklarifikasi hal-hal terkait kepada tim koordinasi TPB/SDGs di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan pencapaian TPB/SDGs.

Tabel 1. Kerangka Telaah Dokumen Pelaporan Pencapaian TPB/SDGs

Komponen Evaluasi	Aspek Penilaian	Referensi
Kriteria Pelaporan	Format Laporan Mengikuti Kepmen PPN Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021 Proses Penyusunan Laporan Yang Sesuai Dengan Kepmen PPN Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021 Konsistensi Penyusunan Laporan Di Setiap Tahun	Kepmen PPN Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021
Cakupan Informasi	Keterkaitan antara Indikator TPB Daerah dan Nasional Tujuan, Indikator dan Target Spesifik untuk TPB Laporan Mencakup Data Relevan yang Sesuai dengan Indikator yang Dilaporkan Laporan Memberikan Rincian yang Cukup Tentang Metode dan Sumber Data yang Digunakan	1. Kepmen PPN No. 42/M.PPN/HK/04/2020 2. Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs
Detail Pengungkapan	Detail data yang disediakan cukup untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pencapaian SDGs Data disajikan dalam format yang mudah dipahami (grafik, tabel, simbol) Penyediaan Analisis Tren dari Tahun ke Tahun Penjelasan Kendala atau Tantangan Dalam Pencapaian dan Pengumpulan Data Terdapat Metadata yang Dapat Diakses Laporan Di Sampaikan Di Website Pemerintah Provinsi	1. Kepmen PPN No. 42/M.PPN/HK/04/2020 2. Metadata Indikator 3. Raffer et al., 2022
Integrasi dan Keterkaitan	Keselarasan TPB/SDGs Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD Konsistensi dengan Target Jangka Pendek dan Panjang Partisipasi dan Kolaborasi Antar Sektor	Peraturan Menteri PPN No 7 Tahun 2018

Sistem Pengawasan dan Mekanisme
Evaluasi yang Jelas
Transparansi dan Aksesibilitas Laporan
Terdapat Pelaporan Alokasi Anggaran
untuk Program TPB/SDGs
Pemetaan Risiko dan Mitigasi

Sumber : Data Penelitian, 2024

Tabel 2. Daftar Narasumber

No	Kode	Narasumber	Jumlah Partisipasi
1	PJ	Sekretariat Koordinator SDG Provinsi DKI Jakarta	1 Orang
2	A1	Manajer Pilar Pembangunan Sosial	1 Orang
3	A2	Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi	1 Orang
4	A3	Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan	1 Orang
5	A4	Manajer Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola	1 Orang
6	A5	Manajer Data Analyst	1 Orang

Sumber : Data Penelitian, 2024

Selanjutnya, wawancara dilakukan untuk memperdalam analisis penyusunan laporan pencapaian TPB/SDGs di DKI Jakarta. Proses ini menggali hambatan internal, mekanisme penyusunan laporan, dan keterlibatan pemangku kepentingan, sekaligus memastikan analisis mencerminkan kondisi faktual. Hasil wawancara memperkaya temuan dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas laporan.

HASIL PENELITIAN

Kriteria Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Telaah dokumen dilakukan pada laporan pencapaian TPB/SDGs DKI Jakarta untuk menilai kesesuaian dengan Kepmen Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021, mencakup kelengkapan bagian laporan, format, dan struktur penyajian informasi. Evaluasi juga menyoroti konsistensi dan transparansi publikasi laporan melalui situs web Pemerintah Provinsi. Hasil telaah akan disajikan dalam tabel dan narasi untuk memberikan gambaran kualitas pelaporan serta dasar rekomendasi perbaikan.

Laporan Pencapaian TPB DKI Jakarta telah dirancang sesuai Kepmen No. 136/M.PPN/HK/12/2021, mencakup struktur laporan lengkap dan elemen penting, serta disusun secara partisipatif dengan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Laporan ini tersedia secara daring melalui sdgs.jakarta.go.id, memudahkan akses dan transparansi bagi pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi DKI Jakarta, bahwa.

“Pada RAD TPB 2017-2022, Jakarta menggunakan Metadata Indikator SDGs Edisi I sebagai acuan. Dengan mengadopsi Metadata tersebut, Jakarta menggunakan indikator SDGs global, nasional, dan indikator proxy/daerah.” (A2, 2024)

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs secara terstruktur dengan mengacu pada Metadata Indikator SDGs Edisi I, RAD TPB 2017-2022, RPJMD, RKPD, dan kebijakan terkait lainnya. Meskipun belum ada pelatihan khusus, kegiatan pemantauan dan evaluasi dari pemerintah pusat membantu meningkatkan kualitas pelaporan. Sebagaimana dijelaskan oleh Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan.

"Saat ini belum ada pelatihan khusus, namun terdapat beberapa acara dari pemerintah pusat yang konten pembahasannya di dalamnya juga terkait dengan monev capaian TPB/SDGs..."(A3, 2024)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan langkah-langkah terstruktur dalam menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian TPB/SDGs, dengan pemanfaatan Metadata Indikator SDGs Edisi I dalam penyusunan RAD TPB 2017-2022 yang memastikan konsistensi dengan indikator global dan relevansi lokal. Meskipun belum ada pelatihan khusus terkait pelaporan TPB/SDGs, kegiatan pemantauan dan evaluasi dari pemerintah pusat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan pelaporan. Laporan TPB/SDGs DKI Jakarta mengacu pada dokumen penting seperti RPJMD dan RKPD, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya laporan keberlanjutan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, seperti penelitian Pineda et al. (2017) di Kolombia, Masuda et al. (2022) di Jepang, dan Abhayawansa et al. (2021) di Australia. Di DKI Jakarta, laporan TPB/SDGs dipublikasikan melalui situs sdgs.jakarta.go.id, yang meningkatkan aksesibilitas bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum, mirip dengan praktik di kota-kota Eropa seperti Freiburg, Stuttgart, dan Mannheim (Raffer et al., 2022). Struktur laporan TPB/SDGs DKI Jakarta yang sesuai dengan Kepmen PPN No. 136/M.PPN/HK/12/2021 menunjukkan konsistensi dan kemudahan pemahaman, mendukung tujuan pelaporan yang sistematis dan transparan.

Cakupan Informasi Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Laporan TPB/SDGs DKI Jakarta telah menyajikan berbagai komponen informasi penting untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah. Laporan ini mencakup tujuan TPB/SDGs yang relevan, serta indikator dan target spesifik yang dirancang untuk setiap tujuan tersebut. Lebih lanjut, manajer pilar pembangunan sosial turut berperan dalam memastikan keselarasan indikator dan target dengan prioritas pembangunan sosial di Jakarta, sehingga mendukung pencapaian tujuan secara efektif.

"Indikator-indikator global dari SDGs dipetakan dengan kebijakan dan program daerah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa target SDGs yang relevan diterjemahkan ke dalam konteks lokal." (A1, 2024)

"Laporan capaian yang disampaikan setiap tahun kepada Sekretariat Nasional SDGs Indonesia dan Kemendagri RI merupakan hasil capaian dari dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB Provinsi DKI Jakarta..."(A4, 2024)

Proses pemetaan ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan agar target-target SDGs yang relevan bisa diterjemahkan dan diadaptasi secara tepat dalam konteks lokal DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pencapaian SDGs dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tantangan serta kebutuhan yang ada di tingkat daerah.

Penelitian oleh Masuda et al. (2022) dan Raffet et al. (2022) menunjukkan bahwa integrasi indikator SDGs dalam kebijakan lokal sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Abhayawansa (2021) menekankan pentingnya indikator yang terperaturanisasi untuk

mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencerminkan kesejahteraan dan keberlanjutan. Laporan Pencapaian TPB/SDGs DKI Jakarta mencakup berbagai indikator yang relevan, termasuk yang selaras dengan indikator nasional, meskipun beberapa bagian masih memerlukan klarifikasi untuk memastikan keakuratannya. Laporan ini memperkuat transparansi dan kredibilitas melalui penyertaan data dari berbagai sumber resmi dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Proses adaptasi indikator global ke tingkat lokal dilakukan dengan cermat untuk memastikan relevansi dengan tantangan di DKI Jakarta, namun laporan ini masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas dan keakuratan data guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pembangunan berkelanjutan (Masuda et al., 2022; Raffet et al., 2022; Abhayawansa et al., 2021).

Detail Pengungkapan Laporan Pencapaian TPB/SDGs

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa laporan TPB/SDGs DKI Jakarta telah mencakup berbagai elemen penting, seperti rincian metode dan sumber data, penyajian data dalam format yang mudah dipahami, dan potret kinerja capaian SDGs pada laporan tahunan. Laporan ini juga berhasil menyajikan analisis tren tahunan, status ketersediaan data capaian indikator TPB/SDGs, serta penjelasan terkait kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pencapaian TPB/SDGs.

Namun, beberapa komponen membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, seperti penyediaan metadata yang dapat diakses dan tabulasi pencapaian masing-masing Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan komitmen yang baik dalam memaparkan capaian TPB/SDGs, meskipun beberapa data masih memerlukan klarifikasi untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan pelaporan. Untuk itu, verifikasi langsung akan dilakukan dengan manajer data analyst guna memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan.

“Data yang disediakan dalam laporan, meskipun mencakup indikator-indikator yang relevan, sering kali bersifat umum atau makro, sehingga belum sepenuhnya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian TPB/SDGs di Jakarta. Untuk menyusun laporan yang lebih menyeluruh dan akurat, diperlukan data yang lebih terperinci dan spesifik, yang dapat mencerminkan kondisi dan tantangan lokal di Jakarta, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika yang terjadi di tingkat daerah.” (A5, 2024)

Hal ini menyebabkan beberapa informasi penting yang lebih mendalam terkait dengan kondisi lokal dan kelompok masyarakat tertentu belum tergambar secara lengkap. Untuk menghasilkan laporan yang lebih komprehensif, diperlukan tambahan data yang lebih terperinci, terdisagregasi, dan relevan, yang mencakup aspek-aspek lokal seperti perbedaan antar wilayah, kelompok usia, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Dengan melengkapi data tersebut, laporan akan lebih mencerminkan pencapaian SDGs yang lebih tepat dan sesuai dengan realitas di DKI Jakarta.

“Ya, Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam pengumpulan data untuk memantau kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada pilar sosial.” (A1, 2024)

Koordinator Sekretariat TPB DKI Jakarta menambahkan bahwa laporan ini sudah mencakup elemen-elemen penting yang mendukung transparansi dan pemahaman yang lebih baik terhadap pencapaian TPB/SDGs. Laporan ini juga berhasil menggambarkan potret kinerja capaian TPB/SDGs serta memberikan analisis tren tahunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki dan memperbarui data untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan TPB/SDGs.

"Tantangan besar tetap ada dalam hal pengumpulan data yang akurat dan koordinasi yang efektif antar instansi terkait untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang disajikan...."

"Tim koordinasi di Bappeda DKI Jakarta terus melakukan upaya untuk memastikan bahwa pengumpulan data dan tata kelola yang baik antar instansi ini dapat berjalan dengan lancar..." (A3, 2024)

Selain pelatihan, kolaborasi multipihak menjadi komponen yang sangat krusial. Berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat, dilibatkan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, data, dan sumber daya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kualitas laporan tetapi juga memastikan bahwa berbagai perspektif dan kebutuhan terakomodasi dalam penyusunan laporan pencapaian TPB/SDGs.

Laporan TPB/SDGs DKI Jakarta mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyajikan data yang transparan dan mudah dipahami, meskipun beberapa komponen, seperti metadata dan tabulasi pencapaian Kabupaten/Kota, masih perlu perbaikan. Tantangan utama dalam pengumpulan data mencakup kesulitan akses, keterlambatan publikasi, serta kekurangan data terdisagregasi, longitudinal, dan kualitatif. Meskipun demikian, DKI Jakarta telah mengembangkan platform data terpadu Carik Jakarta untuk mengintegrasikan data dari sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebencanaan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pendekatan berbasis data interaktif.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan juga memperkuat kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian SDGs. Penelitian oleh Mutiarani & Siswanto (2020), Sari et al. (2022), serta penelitian internasional (Raffer et al., 2022; Masuda et al., 2022; Abhayawansa et al., 2021) menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif dan data yang memadai adalah kunci keberhasilan implementasi SDGs di tingkat lokal, meskipun keterbatasan data tetap menjadi tantangan, baik di Indonesia maupun di negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Australia, yang menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengumpulan dan evaluasi data untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs.

Integrasi dan Keterkaitan

Evaluasi ini mencakup berbagai komponen penting, seperti penyelarasan dengan kebijakan daerah, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pengelolaan anggaran yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, proses evaluasi juga menitikberatkan pada kesesuaian laporan dengan format dan struktur yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RAN TPB/SDGs untuk Integrasi dan Keterkaitan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 pada 16 April 2018, mengintegrasikan isu-isu strategis nasional, regional, dan internasional. Salah satu isu strategis berskala global yang menjadi perhatian adalah implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi inti dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu menciptakan kota yang maju, lestari, berbudaya, serta melibatkan masyarakat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Pembentukan Tim Koordinasi TPB/SDGs 2017-2022 pada tahun yang sama berperan penting dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi tersebut.

“Penyusunan laporan sangat penting untuk mengukur keberhasilan pencapaian dan kendala apa saja yang ada, sehingga bisa dicarikan solusi untuk mencapai tujuan SDGs secara komprehensif.” (PJ, 2024)

Penyelarasan dengan kebijakan daerah juga telah diidentifikasi, menunjukkan bahwa program TPB/SDGs sejalan dengan RPJMD DKI Jakarta, yang penting untuk pencapaian SDGs dan prioritas pembangunan lokal. Selain itu hasil wawancara dengan Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi bahwa.

“Laporan TPB/SDGs memastikan informasi yang relevan dan sesuai ketentuan, dengan penyelarasan yang kuat terhadap kebijakan daerah. Jakarta mengadopsi Metadata indikator SDGs Edisi I pada RAD TPB 2017-2022, mencakup indikator global, nasional, dan daerah, sehingga laporan TPB/SDGs 2019-2022 tidak hanya memenuhi ekspektasi global, tetapi juga sesuai dengan karakteristik daerah.” (A2, 2024)

Voluntary Local Review (VLR) adalah mekanisme bagi pemerintah daerah untuk melaporkan kemajuan pencapaian SDGs di tingkat lokal. VLR membantu mengevaluasi kebijakan, mengidentifikasi tantangan, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan setempat, guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Penyusunan laporan sangat penting untuk mengukur keberhasilan pencapaian dan kendala apa saja yang ada, sehingga bisa dicarikan solusi untuk mencapai tujuan SDGs secara komprehensif.” (PJ, 2024)

“Setelah momentum 2030, DKI Jakarta akan terus mengkonsolidasikan capaian SDGs yang telah diraih, sambil terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan global yang dinamis. Fokus utama akan diarahkan pada penguatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, peningkatan kualitas hidup warga, serta penguatan peran Jakarta sebagai kota global yang inklusif.” (PJ, 2024)

Laporan ini menjadi alat penting untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program. Formulir-formulir yang disediakan membantu dalam menilai keberhasilan program berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Pemetaan risiko dan mitigasi di DKI Jakarta merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian TPB/SDGs di daerah ini. Proses dimulai dengan analisis situasi daerah yang mencakup berbagai aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola.

“Laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di daerah biasanya mencakup proses identifikasi dan pemetaan risiko

sebagai langkah antisipasi terhadap hambatan yang mungkin muncul. Pemetaan risiko dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, dengan melibatkan data dan masukan dari berbagai pihak.” (A1, 2024)

Laporan TPB/SDGs DKI Jakarta mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyajikan data yang transparan dan mudah dipahami, meskipun beberapa komponen, seperti metadata dan tabulasi pencapaian Kabupaten/Kota, masih perlu perbaikan. Tantangan utama dalam pengumpulan data mencakup kesulitan akses, keterlambatan publikasi, serta kekurangan data terdisagregasi, longitudinal, dan kualitatif. Meskipun demikian, DKI Jakarta telah mengembangkan platform data terpadu Carik Jakarta untuk mengintegrasikan data dari sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kebencanaan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pendekatan berbasis data interaktif. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan juga memperkuat kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian SDGs. Penelitian oleh Mutiarani & Siswantoro (2020), Sari et al. (2022), serta penelitian internasional (Raffer et al., 2022; Masuda et al., 2022; Abhayawansa et al., 2021) menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif dan data yang memadai adalah kunci keberhasilan implementasi SDGs di tingkat lokal, meskipun keterbatasan data tetap menjadi tantangan, baik di Indonesia maupun di negara-negara maju seperti Jerman, Jepang, dan Australia, yang menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengumpulan dan evaluasi data untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan methodological triangulation, yang melibatkan telaah dokumen dan wawancara. Telaah dokumen dilakukan untuk menganalisis kesesuaian Laporan Pencapaian TPB/SDGs DKI Jakarta dengan ketentuan Kepmen PPN No. 136/M.PPN/HK/12/2021, Kepmen PPN No. 42/M.PPN/HK/04/2020, dan Permen PPN No. 07 Tahun 2018, sedangkan wawancara dilakukan dengan Tim Koordinasi Sekretariat SDGs DKI Jakarta. Berdasarkan analisis, laporan telah memenuhi ketentuan terkait kriteria pelaporan, cakupan informasi, detail pengungkapan, serta integrasi dan keterkaitan. Laporan disusun dalam format yang sesuai dan struktur lengkap, mencakup indikator TPB daerah yang relevan, data, tujuan, serta target spesifik, meskipun pengungkapan metode dan sumber data masih dapat ditingkatkan. Data disajikan dalam format grafik dan tabel yang mudah dipahami, dilengkapi analisis tren, penjelasan kendala, metadata yang dapat diakses, serta upaya mengatasi tantangan pengumpulan data. Selain itu, laporan mengintegrasikan Metadata Indikator SDGs untuk meningkatkan akurasi pengungkapan, sehingga sesuai dengan ketentuan pelaporan TPB/SDGs di tingkat daerah.

Laporan TPB/SDGs ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Laporan ini menjadi dasar penting untuk perencanaan dan evaluasi strategis, yang tidak hanya menekankan pencapaian angka tetapi juga dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan kolaborasi yang melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, serta sistem pengawasan yang efektif, diharapkan pencapaian SDGs di DKI Jakarta

dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhayawansa, S., Adams, C. A., & Neesham, C. (2021). Accountability and governance in pursuit of Sustainable Development Goals: conceptualising how governments create value. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 34(4), 923–945. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2020-4667>
- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: A sustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243–260. <https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1765822>
- Bebbington, J., & Unerman, J. (2018). Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An enabling role for accounting research. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(1), 2–24.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2024). Indikator TPB Provinsi DKI Jakarta Vol 5 2024.
- Erin, O. A., & Bamigboye, O. A. (2022). Evaluation and analysis of SDG reporting: evidence from Africa. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 18(3), 369–396. <https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2020-0025>
- Forestier, O., & Kim, R. E. (2020). Cherry-picking the Sustainable Development Goals: Goal prioritization by national governments and implications for global governance. *Sustainable Development*, 28(5), 1269–1278.
- Giles-Corti, B., Lowe, M., & Arundel, J. (2020). Achieving the SDGs: Evaluating indicators to be used to benchmark and monitor progress towards creating healthy and sustainable cities. In *Health Policy* (Vol. 124, Issue 6, pp. 581–590). Elsevier Ireland Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.03.001>
- Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2018 Tentang RAD TPB Tahun 2017-2022 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103753/pergub-prov-dki-jakarta-no-156-tahun-2018>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. <https://sdgs.bappenas.go.id/literasi/laporan/>
- Masuda, H., Kawakubo, S., Okitasari, M., & Morita, K. (2022). Exploring the role of local governments as intermediaries to facilitate partnerships for the Sustainable Development Goals. *Sustainable Cities and Society*, 82.
- Masuda, H., Okitasari, M., Morita, K., Katramiz, T., Shimizu, H., Kawakubo, S., & Kataoka, Y. (2021). SDGs mainstreaming at the local level: case studies from Japan. *Sustainability Science*, 16(5), 1539–1562.
- Meuleman, L. (2021). Public administration and governance for the sdgs: Navigating between change and stability. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13115914>
- Mutiarani, N. D., & Siswantoro, D. (2020). The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs). *Cogent Business and Management*, 7(1).
- Odagiri, M., Cronin, A. A., Thomas, A., Kurniawan, M. A., Zainal, M., Setiabudi, W., Gnilo, M. E., Badloe, C., Virgiyanti, T. D., Nurali, I. A., Wahanudin, L., Mardikanto, A., & Pronyk, P. (2020). Achieving the Sustainable Development Goals for water and sanitation in Indonesia – Results from a

- five-year (2013–2017) large-scale effectiveness evaluation. *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 230.
- Office of Assistant to Deputy Cabinet for Secretary for State Documents & Translation. (2023). Success in Achieving Most Progressive SDGs Proves Indonesia's Commitment to the World. Cabinet Secretary of The Republic of Indonesia. <https://setkab.go.id/en/success-in-achieving-most-progressive-sdgs-proves-indonesias-commitment-to-the-world/>
- Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Laporan Pencapaian.
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21).
- Pineda-Escobar, M. A. (2019). Moving the 2030 agenda forward: SDG implementation in Colombia. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 19(1), 176–188.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227039/perpres-no-111-tahun-2022>
- Publik, K. I., Laweyan, K., Tengah, J., Dinas, K., Pangan, K., Jawa, P., Belanja, A., & Provinsi, P. (2008). Form Permohonan Informasi. 14, 1–2.
- PWC. (2022). Sustainability Report 2022. www.pwc.com/sk/en
- Raffer, C., Scheller, H., & Peters, O. (2022). The UN Sustainable Development Goals as innovation drivers for local sustainability governance? Examples from Germany. *Public Sector Economics*, 46(4), 459–487.
- Rahman, M. M. (2021). Achieving Sustainable Development Goals of Agenda 2030 in Bangladesh: the crossroad of the governance and performance. *Public Administration and Policy*, 24(2), 195–211.
- Sari, D. A., Margules, C., Lim, H. S., Sayer, J. A., Boedhihartono, A. K., Macgregor, C. J., Dale, A. P., & Poon, E. (2022). Performance Auditing to Assess the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19).
- Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta. (2023). Laporan Pemantauan TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta Periode Semester 1 Tahun 2022. [https://sdgs.jakarta.go.id/file/Laporan Pemantauan TPB Semester I 2022.pdf](https://sdgs.jakarta.go.id/file/Laporan%20Pemantauan%20TPB%20Semester%20I%202022.pdf)
- United Nations Department of Economics and Social Affairs. (2023). World Public Sector Report 2023: transforming institutions to achieve the sustainable... development goals after the pandemic. UNITED NATIONS.
- Universitas Indonesia. (2024). UI Wujudkan SDGs di ASEAN dan Global South. <https://www.ui.ac.id/ui-wujudkan-sdgs-di-asean-dan-global-south/>